

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS PADA PROGRAM DAUR
AKSI CIREUNDEU DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU
KELURAHAN LEUWIGAJAH KOTA CIMAHI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana terapan Program Studi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
(S.Tr.Sos)**

**Disusun Oleh
Lulu Rafiq Asqia
NRM: 20.03.036**



**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2024**

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

1.1 Konsep yang Relevan dengan Penelitian

1.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

1.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya” atau “kuasa” yang berarti kesanggupan melakukan sesuatu atau kekuatan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada kapasitas masyarakat untuk (a) memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memperoleh kebebasan, (b) mengakses sumber daya produktif untuk meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Soeharto, 2010).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya yang saat ini belum mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memampukan dan memberdayakan masyarakat (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

Mardikanto (2015) dalam bukunya menyatakan bahwa pemberdayaan melibatkan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat rentan agar mereka dapat menyuarakan keprihatinannya dan berani memilih cara untuk meningkatkan kehidupannya. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses terencana untuk meningkatkan apa yang diberdayakan. Subyek atau badan yang diberdayakan adalah individu atau kelompok yang menghadapi keterbatasan, kekurangan, atau keterbelakangan dalam berbagai aspek, sehingga memerlukan upaya peningkatan kesetaraan dan pengurangan kesenjangan melalui revitalisasi dan optimalisasi utilitas melalui peningkatan nilai-nilai yang ada.

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan di sini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

(miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, dan secara bertanggung jawab mengelola lembaga masyarakatnya demi perbaikan kehidupan. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya berkelanjutan untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah yang kurang mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan (Mardikanto, 2009).

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto (2013:61) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan kemampuan atau keunggulan dalam bersaing bagi kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan, dan mengakses sumber daya serta layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang direncanakan untuk meningkatkan utilitas atau kualitas dari subjek yang diberdayakan.

Dubois & Miley (2017:74) mendefinisikan pemberdayaan merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan proses multisistem yang memiliki dampak pada tingkat personal, interpersonal, dan politik. Pada tingkat individu, pemberdayaan mengacu pada perasaan subjektif tentang kompetensi dan kontrol atas kehidupan mereka. Pada tingkat interpersonal, pemberdayaan mencakup rasa ketergantungan, dukungan, dan penghargaan status dalam hubungan antar individu. Sedangkan pada tingkat sosial-politik, pemberdayaan berkaitan dengan peluang yang objektif dalam struktur sosial dan redistribusi kekuasaan melalui perubahan struktur tersebut.

Edi Suharto (2005:60) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau kemampuan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial.

Definisi pemberdayaan dari Person yang dikutip oleh Edi Suharto (2010), pemberdayaan adalah suatu proses di mana individu menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan dan pengaruh terhadap kejadian serta lembaga-lembaga yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan pentingnya individu memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka sendiri dan orang lain yang menjadi perhatian mereka.

Menurut Adi (2008:83-85), upaya pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah program atau proses. Pemberdayaan sebagai program merujuk pada serangkaian kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mungkin berlangsung selama 1, 2, atau 5 tahun. Ketika program tersebut selesai, pemberdayaan dianggap telah terlaksana. Namun, pemberdayaan juga bisa dipahami sebagai proses yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang atau keberlangsungan komunitas. Dalam konteks masyarakat, proses pemberdayaan tidak berakhir dengan selesainya suatu program, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Proses ini akan terus berlangsung selama komunitas tersebut masih ada dan bersedia untuk mengembangkan potensi mereka sendiri.

Berdasarkan dengan berbagai konsep pemberdayaan yang telah dijelaskan maka pemberdayaan yang dilakukan disini didefinisikan sebagai sebuah proses. Pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan mengacu pada konsep pemberdayaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan seiring dengan keberlangsungan komunitas Kampung Adat Cireundeu.

1.2.1.2 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu proses, pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan: penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberian kekuasaan. Hal ini dapat disederhanakan sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

- a. Tahap pertama adalah *awareness*, dimana sasaran yang akan diberdayakan diberikan pencerahan mengenai haknya untuk memiliki “sesuatu”. Misalnya,

jika sasarannya adalah kelompok masyarakat miskin, mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat memperbaiki keadaan dan keluar dari kemiskinan jika mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Program pada tahap ini mungkin mencakup pemberian pengetahuan kognitif, berbasis keyakinan, dan penyembuhan. Prinsip dasarnya adalah membuat sasaran memahami perlunya pemberdayaan, dengan proses pemberdayaan dimulai dari dalam dirinya.

- b. Tahap kedua adalah peningkatan kapasitas, sering juga disebut dengan *capacity building*, atau lebih sederhananya, memungkinkan. Sebelum pemberdayaan dapat diberikan, individu terlebih dahulu harus mampu. Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, daerah yang akan diberi otonomi harus menjalani program peningkatan kapasitas agar mampu mengelola otonomi yang diberikan.
- c. Tahap ketiga adalah pemberian kekuasaan sebenarnya atau pemberdayaan dalam arti sempit. Pada tahap ini, sasaran diberi kekuasaan, wewenang, atau peluang.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Adi (2008) dalam pemberdayaan terdapat tujuh tahapan yakni sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan

Tahap ini ada dua langkah yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan pertama, persiapan petugas dimana pekerja sosial sebelum melaksanakan pemberdayaan akan menyamakan persepsi terkait suatu isu yang akan ditangani. Penting dalam persiapan petugas ini untuk membahas pembagian tugas dan teknik-teknik yang akan digunakan dalam melakukan intervensi yang akan disesuaikan dengan daerah sasaran. Kedua yakni melakukan penyiapan lapangan yang idealnya dilakukan secara non-direktif dimana pekerja sosial akan melakukan studi kelayakan pada daerah sasaran melalui jalur formal maupun informal melakukan kontak untuk mendapatkan kontrak dengan pihak-pihak terkait daerah sasaran.

- b. Tahap Asesmen

Tahap ini merupakan proses penilaian dapat dilakukan secara individu melalui tokoh masyarakat (*key person*), namun dapat juga melibatkan kelompok

dalam masyarakat. Dalam hal ini, pekerja sosial harus berusaha untuk mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang tersedia bagi komunitas. Menilai kebutuhan juga dapat menggunakan konsep *normative needs* atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk diperbaiki komunitas namun belum disadari anggota komunitas.

Asesmen partisipatoris dalam menggali kebutuhan dan permasalahan terdapat empat aspek indikasi yang perlu ditelusuri dimana satu sama lain dari empat aspek ini saling berhubungan. Pertama, Asesmen Kualitas hidup masyarakat guna mencari dan menggali kondisi kehidupan masyarakat yang dirasa kurang menyenangkan, kedua asesmen faktor manusia dan sosial yang terperinci didalamnya menganalisis faktor perilaku dan gaya hidup; faktor predisposisi; faktor penguat; dan faktor modal sosial, ketiga asesmen bukan manusia, dan keempat asesmen peraturan dan kebijakan. Setelah dilakukan rangkaian upaya pengumpulan data langkah selanjutnya memformulasikan analisa masalah.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program

Tahap ini personel yang bertindak sebagai agen pertukaran, secara partisipatif melibatkan warga dalam memikirkan permasalahan yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan mempertimbangkan berbagai alternatif program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dalam perancang program aksi dengan komunitas sebelumnya perlu diperhatikan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab, apa sumber daya yang dibutuhkan apakah hasil yang diharapkan dan hasil output yang dapat dicapai.

d. Tahap Perumusan Rencana Aksi

Tahap ini agen perubahan membantu setiap kelompok dalam merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, para pekerja sosial atau fasilitator juga dapat membantu merumuskan ide-idenya dalam bentuk tertulis, terutama dalam penyusunan proposal untuk lembaga pendanaan.

Merumuskan dan menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dengan menuliskan rencana dan apa yang hendak dicapai serta bagaimana mencapai tujuan

tersebut. Dengan menentukan objective dari setiap kegiatan yang harus terukur sehingga dibuatlah indikator keberhasilan untuk memudahkan proses evaluasi. Setelah itu dibuatkan *timeline* kegiatan yang kemudian diajukan pada key person

e. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Upaya melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjamin keberlanjutan program yang dikembangkan. Kerja sama antara personel dan masyarakat sangat penting dalam tahap ini karena terkadang inisiatif yang direncanakan dengan baik bisa saja menyimpang ketika dilaksanakan. Perencanaan yang telah dirumuskan dapat melenceng tatkala ada pihak yang tidak bekerja sama sehingga perlu peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program hingga berjalan.

f. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses pemantauan oleh warga dan personel terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan, idealnya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan keterlibatan tersebut, sistem pemantauan masyarakat dapat dibangun dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang dapat membangun masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap terminasi atau pengakhiran melibatkan penghentian hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Pada tahap ini, proyek harus segera berakhir. Personel harus menjaga kontak, meskipun tidak secara rutin, dan secara bertahap mengurangi kontak dengan komunitas sasaran seiring berjalannya waktu.

1.2.1.3 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014:206-208), konsep pemberdayaan dapat dijelaskan melalui empat perspektif berbeda: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

- a. Perspektif pluralis, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung agar dapat bersaing lebih efektif dengan kepentingan lain. Ini dilakukan melalui pembelajaran untuk

meningkatkan kapasitas mereka sehingga bisa berpartisipasi secara lebih baik dalam peraturan.

- b. Perspektif elitis, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mempengaruhi dan berkolaborasi dengan kalangan elit seperti tokoh masyarakat, pejabat, dan lainnya. Tujuannya adalah membentuk aliansi dengan mereka dan mengupayakan perubahan melalui kalangan elit.
- c. Sudut pandang struktural menjelaskan pemberdayaan masyarakat merupakan agenda perjuangan yang lebih kompleks karena mencakup eliminasi bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Hal ini terjadi ketika masyarakat merasa tidak berdaya karena struktur sosial yang dominan dan menindas mereka, baik berdasarkan kelas sosial, gender, ras, atau etnisitas. Pemberdayaan dalam konteks ini mencakup pembebasan, perubahan struktural, dan penghapusan penindasan struktural.
- d. Perspektif post-struktural menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah proses yang mengubah atau menantang dikursus yang ada. Ini mengacu pada pengembangan pemahaman baru dan analitis terhadap perkembangan pemikiran dalam masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Elliott (1996) merupakan metode pemberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat, yang membantu mencapai tujuan pembangunan dalam pemberdayaan. Elliott mengusulkan tiga pendekatan pemberdayaan:

- a. Pendekatan kesejahteraan, yang berfokus pada pemberian bantuan fisik atau material kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- b. Pendekatan pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kemandirian, kemampuan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
- c. Pendekatan pemberdayaan, yang berkonsentrasi pada penguatan kapasitas dan potensi masyarakat dengan memberikan dukungan, fasilitas, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya dan lingkungannya sendiri.

Konsep pemberdayaan yang telah diuraikan, maka pemberdayaan yang artikan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sebagai sebuah proses yang berlangsung secara terus menerus dengan keterlibatan partisipatif warga yang diberikan daya sehingga tercapai tujuan menuntaskan sampah dari sumbernya.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Adat Cireundeu dilakukan dengan tahapan pemberdayaan oleh Isbandi Rukminto Adi pengintegrasian konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan pendekatan *social engineering*, pengolahan terpadu, dan promosi wisata ekowisata edukasi pengelolaan sampah, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, dan digitalisasi dalam sistem pengelolaan sampah. Integrasi konsep-konsep ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga mendukung tujuan pemberdayaan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sampah dan memanfaatkan teknologi serta pendekatan yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi semua.

1.1.2 Pengelolaan Sampah

1.2.2.1 Pengertian Sampah

Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2010 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga.

Kamus Lingkungan (1994) sampah memiliki dua arti yaitu (1) bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau bercacat dalam pembuatan (manufaktur), atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan, dan (2) *waste* (sampah/limbah); proses teratur dalam membuang bahan tak berguna atau tak diinginkan.

Pengertian mengenai sampah dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah benda yang sudah tidak berharga dan tidak lagi memiliki nilai layak guna.

1.2.2.2 Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia sangatlah penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan. Pengelolaan sampah melibatkan upaya sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan limbah mencakup langkah-langkah seperti membatasi timbulan limbah, mendaur ulang, dan penggunaan kembali sampah (UU No. 18 Tahun 2008).

Masyarakat dan dunia usaha penting untuk meminimalkan timbulan sampah, mendorong penggunaan kembali, memfasilitasi daur ulang, dan memastikan bahan-bahan dapat terurai secara hayati untuk mencapai tujuan ini. Penanganan sampah meliputi pemilahan dan pemilahan sampah menurut jenis, jumlah, dan karakteristiknya. Diikuti dengan pengumpulan dan pemindahan ke fasilitas penyimpanan sementara, dan kemudian pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir. Di lokasi pengolahan ini, sampah diolah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan volumenya, atau diolah untuk mengintegrasikan kembali bahan olahan dengan aman ke lingkungan.

Secara umum, pengelolaan sampah di perkotaan melibatkan tiga tahap kegiatan, yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Menurut Alfiandra (2009), tahapan-tahapan dalam proses kegiatan pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, merujuk pada proses pengelolaan sampah dari tempat asalnya hingga tempat pembuangan sementara sebelum langkah selanjutnya. Pada tahap ini, berbagai alat seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara digunakan. Untuk menjalankan pengumpulan, biasanya diperlukan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah dalam interval waktu tertentu.
- b. Pengangkutan, merupakan kegiatan mengangkut sampah menggunakan sarana transportasi tertentu menuju tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan. Pada tahapan ini, juga diperlukan tenaga yang melakukan

pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) dalam interval waktu tertentu.

- c. Pembuangan akhir, adalah tahapan dimana sampah akan mengalami proses pemrosesan fisik, kimia, atau biologis secara menyeluruh hingga penyelesaian proses.

Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) atau pengelolaan sampah berkelanjutan yang terintegrasi menurut Van de Klundert dan Anschutz (2001) dalam Wilson et al (2013) berkelanjutan yang terintegrasi adalah pendekatan komprehensif dalam mengelola sampah yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Van de Klundert dan Anschutz sebagai respons terhadap masalah kompleks yang terkait dengan pengelolaan sampah di banyak negara. Pendekatan ISWM ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pengelolaan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan

Pendekatan ISWM mencakup beberapa prinsip utama:

- a. Pengurangan (*Reduction*): Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pengurangan pembuangan sampah, penggunaan bahan yang ramah lingkungan, dan promosi gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
- b. Pengumpulan dan Pemilahan (*Collection and Separation*): Melakukan pengumpulan sampah secara efisien dan memisahkan jenis sampah untuk mendukung proses daur ulang dan pengolahan lebih lanjut.
- c. Pengolahan (*Treatment*): Melakukan pengolahan sampah yang tepat sesuai dengan jenis sampahnya, seperti daur ulang, kompos, atau pengolahan energi.
- d. Pembuangan Akhir yang Aman (*Safe Disposal*): Memastikan bahwa sampah yang tidak dapat didaur ulang atau diolah dengan aman dibuang ke tempat pembuangan akhir yang sesuai, seperti tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik (TPA) atau instalasi pengolahan sampah.
- e. Pengelolaan Berkelanjutan (*Sustainable Management*): Memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.2.2.3 Pengelolaan Sampah 3R

Pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengurangi volume sampah atau mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna melalui berbagai metode. Teknik pengelolaan sampah yang sebelumnya menggunakan pendekatan pengumpulan dan pembuangan kini beralih ke pendekatan 3R. 3R mengacu pada *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (penggunaan kembali), dan *Recycle* (daur ulang) sampah. Secara umum, teknik pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduce (pengurangan volume)

Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, seperti praktik pengurangan penggunaan bahan kemasan yang tidak ramah lingkungan.

b. Reuse (penggunaan kembali)

Reuse melibatkan penggunaan kembali atau mendaur ulang bahan dari sampah agar dapat dimanfaatkan kembali, seperti menggunakan kembali bahan konstruksi dari material bangunan yang sudah tidak terpakai.

c. Recycle (daur ulang)

Recycle melibatkan pemisahan bahan anorganik dari tumpukan sampah untuk diproses kembali menjadi bahan baku atau produk yang lebih bermanfaat, seperti botol plastik, kaleng, dan kardus.

Berdasarkan tinjauan teori mengenai pengelolaan sampah yang telah dijelaskan maka pengelolaan sampah pada penelitian ini adalah pemilahan sampah tingkat rumah tangga, pengumpulan secara terpilah, pengangkutan secara terpilah dan pengolahan pada tempat pengolahan sampah. Sehingga pengelolaan sampah yang digunakan ialah pengelolaan sampah berbasis 3R yang dimulai dari tingkat rumah tangga.

1.1.3 Pekerjaan Sosial

1.2.3.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Asian Social Work Journal Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi (2018), *National Association of Social Workers* menyebutkan bahwa Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok,

atau masyarakat untuk dapat meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka agar berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial atau keadaan-keadaan yang telah disebutkan.

The International Federation of Social Workers (IFSW) tahun 2010, dan diterima oleh *International Association of Schools of Social Work* (IASSW) serta *International Council on Social Welfare* (ICSW) menjelaskan bahwa profesi pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang mempromosikan adanya perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan individu, kelompok, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja Sosial, mendefinisikan Pekerja Sosial adalah penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

1.2.3.2 Pekerja Sosial Berwawasan Lingkungan

Menurut Dominelli (2012), peran pekerja sosial atau ahli dibidang kesejahteraan sosial sesungguhnya mempunyai peran penting terkait dengan isu lingkungan. Ahli di bidang ini dapat memberikan pemahaman kepada orang-orang mengenai isu perubahan iklim terhadap kehidupan dan demikian pula kehidupan manusia dapat merusak atau mempengaruhi kondisi lingkungan. Selain itu, pekerja sosial juga mendorong masyarakat luas dalam melakukan penggunaan dan mengkonsumsi energi atau penggunaan energi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, peran ahli di bidang kesejahteraan sosial dan pekerja sosial profesional dapat memobilisasi masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan demi masa depan mereka sendiri dan generasi mendatang. Keterlibatan mereka dapat dilakukan melalui pekerjaan sosial komunitas dan ikut merancang penyelesaian masalah dengan menggunakan model rumah kaca (*green house model*) yakni mengurangi emisi karbon, melakukan advokasi terhadap masyarakat agar peduli untuk melakukan konservasi dan juga menjaga kelestarian lingkungan.

Para ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial belum memberikan perhatian yang cukup terhadap lingkungan hidup secara umum. Ini tercermin dari kurangnya integrasi aspek lingkungan dalam intervensi terhadap masalah sosial di masyarakat. Kesadaran terhadap faktor lingkungan baru muncul setelah para pakar dalam bidang ini mulai membahas dampak buruk kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia. Contohnya, tragedi kecelakaan reaktor Chernobyl di Ukraina pada tahun 1986, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan serta menurunkan kualitas hidup manusia secara signifikan. Peristiwa ini menjadi titik tolak bagi para ahli untuk menyadari bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Gray, M et al (2013).

Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat erat terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk ketidakadilan sosial, kesengsaraan, dan penderitaan manusia yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim. Untuk mengatasi dampak negatif ini, ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial komunitas harus meresponsnya dengan membangun dan mengembangkan sistem kesejahteraan sosial yang memperhatikan kelangsungan hidup manusia. Delgado, M (2000).

Peran penting pekerja sosial profesional terutama terkait dengan sikap masyarakat terhadap lingkungan mereka.

1. "*Positive-greens*" mengajak untuk mengurangi tindakan yang dapat merusak lingkungan sekecil mungkin dan memastikan bahwa semua aktivitas manusia memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia,
2. "*Waste-watcher*" mendorong untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah yang dihasilkan,
3. "*Concerns-consumers*" berkaitan dengan mengurangi beban lingkungan dan tidak melampaui batas kapasitas lingkungan,
4. "*Side line Observers*" menggarisbawahi pentingnya kesadaran terhadap masalah lingkungan,
5. "*Stalled Watchers*" mengubah ketidakpedulian terhadap perubahan iklim dan lingkungan sekitar mereka,

6. "*Completely Unconcerned*" memperbaiki ketidaktahuan atau ketidaksadaran tentang isu perubahan iklim dan lingkungan.

Melalui peran mereka, ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan demi kesejahteraan manusia dan generasi mendatang.

Teori yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja sosial berwawasan lingkungan merupakan pekerja sosial yang memiliki peran krusial dalam memfasilitasi perubahan sikap dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan, serta dalam mempromosikan kesejahteraan manusia yang berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim global dimana didalamnya dipengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung oleh permasalahan sampah seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan.

1.2.3.3 Praktik Pekerja Sosial Makro

Pekerja sosial makro berpraktik pada skala komunitas dengan berdasar pada metode pengembangan masyarakat (*community development*) yang berfokus pada kelompok atau masyarakat. Pengembangan masyarakat juga memiliki beberapa nama lain, seperti pengorganisasian masyarakat (*community organization*), pekerjaan kemasyarakatan (*community work*), pekerjaan sosial dengan masyarakat (*social work with community*) dan praktik pekerjaan sosial makro (*social work macro practice*).

Talcot Parsons (1960) menyatakan bahwa perkembangan organisasi merupakan mekanisme penting pada masyarakat yang terdiferensiasi, karena kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi secara individu menjadi dapat dicapai berkat adanya organisasi. Organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu-individu yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan tertentu (Netting, Kettner dan McMurtry, 2004). Intervensi makro (CO/CD) yaitu bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana dan sistematis pada tingkat organisasi dan komunitas.

1. Model-model *Community Organization and Community Development* (CO/CD)

Rothman dan Trophman (1987) membagi tipe dalam pengembangan masyarakat menjadi tiga jenis, yang pertama yaitu *locality development* (pengembangan komunitas lokal), yang kedua yaitu *social planning and social policy* (perencanaan sosial dan kebijakan sosial), yang ketiga adalah *social action* (aksi sosial).

Andrew Glenn menjelaskan tipe dalam pengembangan masyarakat yang pertama adalah *community development* (CD/comdev/pengembangan komunitas), yang kedua adalah *community action* (aksi komunitas), yang ketiga adalah *community services approche* (tipe pengembangan masyarakat dengan menggunakan lembaga atau organisasi yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan pelayanan secara umum).

2. Strategi dan Taktik *Community Organization and Community Development* (CO/CD)

a. Kolaborasi

Kolaborasi menyiratkan hubungan kerja dimana kedua sistem setuju bahwa perubahan harus terjadi. Sistem target setuju (atau mudah diyakinkan untuk setuju) dengan sistem tindakan yang diperlukan dan mendukung alokasi sumber daya. Taktik yang digunakan yaitu:

- 1). Taktik Implementasi digunakan ketika sistem aksi dan target bersedia bekerja sama. Ketika sistem ini setuju bahwa perubahan diperlukan dan alokasi sumber daya didukung oleh pembuat keputusan penting, perubahan dapat bergerak menuju implementasi.
- 2). Peningkatan Kapasitas
 - a). Partisipasi, mengacu pada kegiatan yang melibatkan anggota sistem klien dalam upaya perubahan.
 - b). Pemberdayaan, mengacu pada langkah-langkah yang diperlukan untuk membebaskan anggota sistem klien dari hambatan nyata atau yang dirasakan untuk partisipasi.

b. Kampanye

Kampanye yaitu sistem target bersedia berkomunikasi dengan sistem tindakan, tetapi ada sedikit konsensus yang berubah diperlukan atau sistem target

mendukung perubahan tetapi tidak ada alokasi sumber daya. Taktik yang digunakan:

1). Pendidikan

Taktik pendidikan melibatkan berbagai bentuk komunikasi dari anggota sistem aksi yang diarahkan pada mereka yang ada dalam sistem target. Tujuannya adalah untuk menyajikan persepsi, sikap, pendapat, data kuantitatif atau informasi lain tentang perubahan yang diusulkan dan untuk menginformasikan anggota sistem target dengan cara yang dapat mengarahkan mereka untuk berpikir atau bertindak secara berbeda tentang perubahan yang diusulkan.

2). Melobi

Melobi adalah suatu bentuk persuasi yang menargetkan pengambilan keputusan yang netral atau menentang perubahan yang diusulkan.

3). Persuasi

Persuasi mengacu pada seni meyakinkan orang lain untuk menerima dan mendukung sudut pandang seseorang tentang suatu masalah. Komunikasi yang terampil mensyaratkan bahwa sistem tindakan dengan cermat memilih individu-individu yang memiliki kemampuan untuk membujuk sebagai pemimpin.

4). Daya Tarik Media Massa

Daya tarik media massa mengacu pada pengembangan dan peluncuran berita ke media cetak dan elektronik untuk mempengaruhi opini publik. Surat langsung, telepon, SMS, email, situs web dan situs media sosial adalah cara yang tepat untuk menyebarkan berita.

c. Kontes

Strategi kontes digunakan dalam situasi dimana perwakilan sistem target tidak dapat dibujuk oleh sistem aksi, perwakilan sistem target menolak untuk berkomunikasi dengan sistem aksi atau anggota sistem target berpose sebagai mendukung perubahan tetapi tidak melakukan apapun untuk memajukannya atau secara diam-diam melawannya. Taktik yang digunakan:

1). Aksi Kelompok Besar atau Komunitas Aksi

Mengacu pada persiapan, pelatihan dan pengorganisasian sejumlah besar orang yang bersedia membentuk kelompok penekan dan mengadvokasi perubahan melalui berbagai bentuk aksi kolektif.

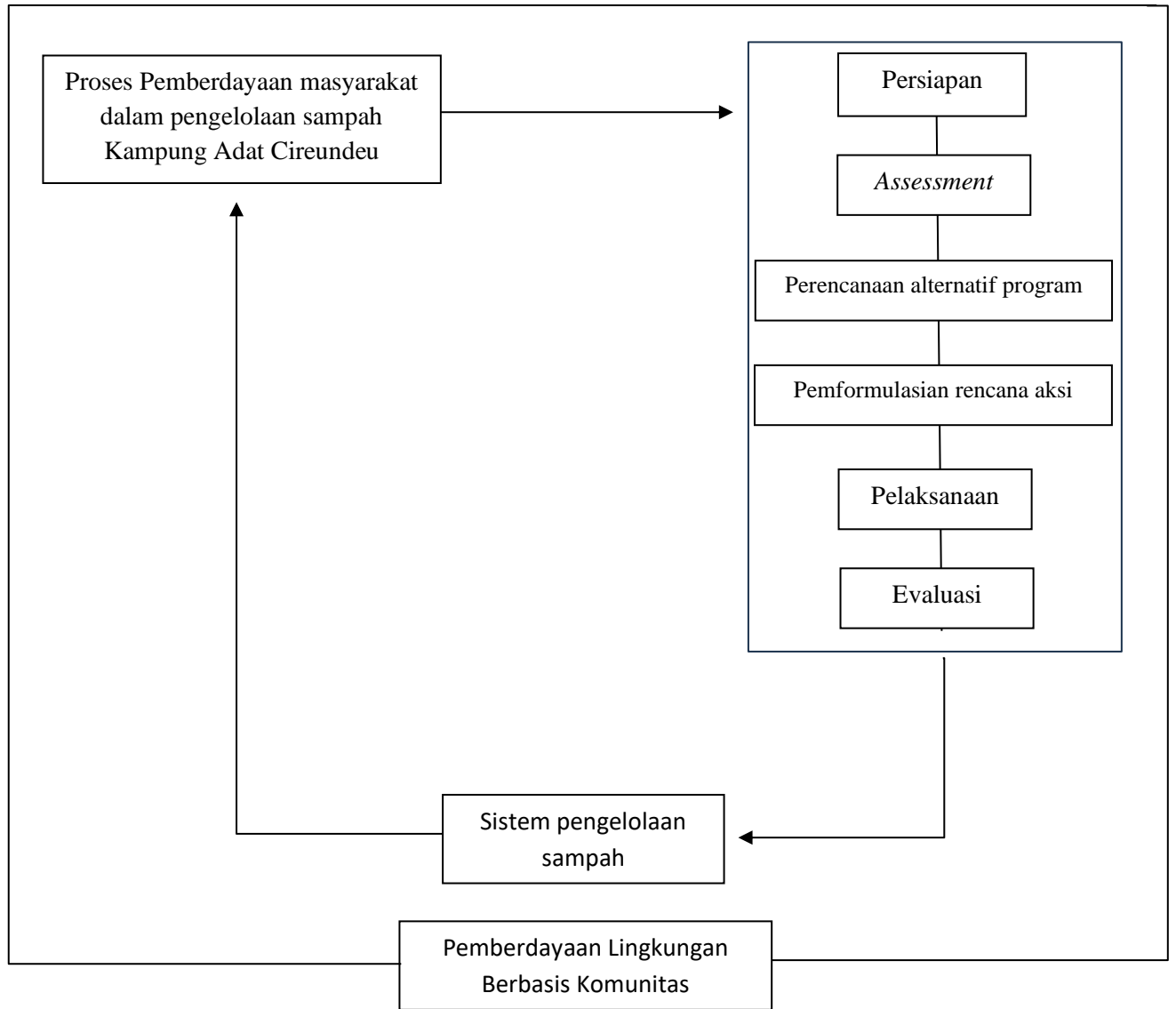
2). Perundingan dan Negosiasi

Mengacu pada situasi dimana tindakan dan sistem target saling berhadapan dengan alasan dukungan dan/atau penolakan mereka terhadap proposal atau masalah.

Berdasarkan teori mengenai praktik pekerjaan sosial yang telah dijelaskan, maka praktik yang dilakukan pada penelitian ini adalah praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas dengan *konsep green social work* atau praktik pekerjaan sosial yang berwawasan lingkungan.

1.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan kerangka pikir penelitian Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas pada program Daur Aksi Cireundeu di Kampung Adat Cireundeu adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang menjawab permasalahan isu lingkungan dan permasalahan sampah yang berdampak buruk pada berbagai aspek. Penelitian ini membangun model pemberdayaan dengan prinsip pemberdayaan adalah sebagai proses yang akan terus menerus berjalan dan berkelanjutan dengan tahapan-tahapan yang dilalui selama proses pemberdayaan berdasarkan pada tujuh tahapan pemberdayaan oleh Isbandi Rukminto Adi.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir